

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada dasarnya dijadikan sebagai acuan untuk memperkaya informasi atau pengetahuan dalam mengkaji fenomena ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Andreano yang mengambil judul “Implementasi kebijakan *green building* sebagai syarat mendapatkan ijin mendirikan bangunan (IMB) melalui perda kota Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang bangunan gedung”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa ada perlawanan dari koordinator gedung bertingkat yang tidak memanfaatkan kawasan hijau yang seharusnya dan untuk Paris Van Java yang mendapat banyak kawasan perhentian tanpa memperhatikan iklim, rencana yang telah ditetapkan setelah sesuai penerbitan IMB tidak dilakukan sehingga mengabaikan metode strategi Green Structure. Kemudian penelitian kedua dilakukan oleh Pujiastuti yang mengambil judul “studi implementasi *green building* di gedung Bank Indonesia Solo”. Dalam penelitian ini disimpulkan sedangkan fondasi pengembangan tempat usaha Bank Indonesia Solo adalah untuk efektivitas energi dan tidak merusak struktur ekosistem serta efek positif dari struktur hijau terhadap iklim, ekonomi dan masyarakat.

Penelitian ketiga oleh Febriana yang berjudul “Penerapan Konsep *Green Building* Pada Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh”. Dalam Kajian ini menduga bahwa struktur Tenaga Kerja Bidang Keuangan dan Bisnis Syariah (FEBI) belum dikenang untuk green structure secara umum dan belum memenuhi standar greenship sehingga belum mendapatkan greenship new structure rating.

Tabel 2.1
Pemetaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andreano, 2018, Implementasi kebijakan <i>Green Building</i> Sebagai Syarat Mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Melalui PERDA Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepatuhan dalam ijin mendirikan bangunan melalui PERDA Kota Bandung nomor 5 tahun 2010 2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kepatuhan pelaksanaan bangunan terhadap perda tersebut. 	Terjadi ketidakpatuhan oleh penyelenggara Bangunan Apartemen yang tidak menggunakan area hijau yang seharusnya dan untuk Paris Van Java yang memperoleh banyak area parkir tanpa memperhatikan lingkungan, desain yang telah disepakati sesuai penerbitan IMB tidak dilaksanakan sehingga melanggar prosedur akan kebijakan <i>Green Building</i> .

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
2	Pujiastuti, 2013, Studi Implementasi <i>Green Building</i> di Gedung Bank Indonesia Solo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi hal-hal yang melatarbelakangi penerapan <i>Green Building</i> pada pembangunan gedung BI Solo 2. Mengetahui Pengetahuan Owner, Kontraktor pada Konsep <i>Green Building</i> 3. Mengidentifikasi dampak penerapan <i>Green Building</i> pada gedung Bank Indonesia Solo. 	Latar belakang pembangunan gedung kantor Bank Indonesia Solo adalah untuk efisiensi energi dan membuat bangunan ramah lingkungan serta dampak <i>Green Building</i> positif bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial.
3	Febriana, 2015, Penerapan Konsep <i>Green Building</i> Pada Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Seberapa besar penerapan <i>green building</i> berdasarkan kriteria standar <i>greenship</i> pada sebuah bangunan gedung pendidikan yaitu fakultas ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) belum termasuk kedalam <i>Green Building</i> secara keseluruhan dan belum

			memenuhi kriteria <i>greenship</i> sehingga belum mendapatkan peringkat <i>greenship new building</i> .
No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
4	Virgarezza I . G, 2019. Implementasi <i>Green Building</i> Sebagai Syarat Mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Melalui PERDA Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi kebijakan <i>Green Building</i> sebagai wujud dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Probolinggo. 2. Faktor penghambat dan pendukung adanya implementasi kebijakan <i>Green Building</i> sebagai wujud pembangunan berkelanjutan di Kota Probolinggo. 	

Sumber : Virgarezza, 2022

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, dapat dilihat bahwa persamaan dalam penelitian ini terletak fokus kajiannya, dimana sama – sama mengkaji tentang, *Green Building*. Sedangkan perbedaannya, berlatar pada lokasi & situs penelitiannya. Dimana penelitian dari Andreano di Bandung, Pujiastuti di Solo dan Febriana di Banda Aceh. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Probolinggo.

Kerangka Dasar Teoritik

Implementasi Kebijakan

Pengertian Impelementasi

Pada umumnya, eksekusi dapat dicirikan sebagai eksekusi atau aplikasi. Sesuai Syaukani dkk (2004: 295). Eksekusi merupakan progresi dari latihan untuk menerapkan strategi pada area lokal, sehingga pendekatan ini dapat membawa hasil yang ideal. Serangkaian latihan ini menggabungkan kesiapan sekelompok pedoman tambahan yang, langsung dari kelelawar, adalah pemahaman tentang strategi, selain itu, aset perencanaan untuk mendorong latihan eksekusi, termasuk kantor aset moneter dan yayasan.

Berdasarkan pandangan ini, disadari bahwa proses pelaksanaan strategi yang sebenarnya tidak hanya menyangkut cara berperilaku dari badan pengelola yang bertanggung jawab dan tentu saja kepastian siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan tersebut, yang ketiga adalah cara untuk menyampaikan strategi secara solid ke daerah setempat. Program dan melaksanakan pertemuan tujuan, tetapi mencakup organisasi kekuatan politik, moneter, dan sosial yang dapat secara langsung atau secara implikasi mempengaruhi cara berperilaku semua pertemuan yang diperlukan untuk mengatur arah sehingga tujuan strategi terbuka dapat diakui karena latihan pemerintah.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005: 65) memaknai pentingnya penerapan ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan sah

atau terbentuk adalah penekanan pertimbangan pada pemanfaatannya. strategi, khususnya kesempatan dan latihan. yang muncul setelah persetujuan aturan strategi negara, yang mencakup dua upaya untuk mengelola dan menyebabkan hasil/akibat nyata dari peristiwa pada masyarakat.

Syukur dalam Surmayadi (2005: 79) memaknai bahwa ada tiga komponen penting dalam siklus pelaksanaan, khususnya: (1) adanya program atau strategi yang dijalankan (2) kumpul yang objektif adalah kumpul yang terfokus. tidak sepenuhnya menetap untuk mendapatkan manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) komponen pelaksana (Praktisi) baik asosiasi atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari interaksi pelaksanaan. Aplikasi ini mencakup upaya para pembuat strategi untuk memengaruhi apa yang disebut Lipsky sebagai "administrator tingkat jalan" untuk menawarkan jenis bantuan atau mengontrol cara berperilaku dari kumpulan target.

Untuk strategi sederhana, pelaksanaannya hanya mencakup satu kantor yang kemampuannya sebagai pelaksana, misalnya, pendekatan perbaikan kerangka kerja publik untuk membantu individu memiliki kehidupan yang lebih baik. Kemudian lagi, untuk pengaturan skala besar, misalnya, strategi pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan, upaya eksekusi akan mencakup berbagai yayasan, seperti organisasi pemerintah daerah, sub-daerah, dan lingkungan.

Kemajuan pelaksanaan strategi tidak ditentukan oleh banyak hal atau elemen, dan masing-masing faktor ini saling terkait satu sama lain.

Untuk membangun bagaimana kami dapat menafsirkan berbagai faktor yang terkait dengan aplikasi, dengan cara ini ada beberapa spekulasi eksekusi:

Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Menurut Edwards III, pelaksanaan strategi dipengaruhi oleh empat faktor, khususnya: (1) korespondensi, (2) aset, (3) sikap, dan (4) desain administratif. Keempat faktor tersebut akan saling mempengaruhi.

1) Komunikasi

Eksekusi strategi yang berhasil mengharuskan praktisi menyadari apa yang harus diselesaikan. Apa maksud dan tujuan pengaturan yang harus diterapkan pada pengumpulan tujuan sehingga akan mengurangi mutilasi eksekusi. Dengan asumsi bahwa tujuan dan sasaran dari suatu strategi tidak memuaskan atau bahkan tidak jelas bagi pertemuan tujuan, hampir pasti, akan ada kekacauan di antara individu-individu dari pertemuan itu.

2) Sumber daya

Meskipun item dalam strategi telah diungkapkan dengan jelas dan andal, ketika praktisi tidak memiliki aset untuk mengeksekusinya, eksekusi tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Aset-aset ini bisa berupa SDM, lebih tepatnya kapasitas praktisi dan aset moneter. Aset adalah variabel penting untuk eksekusi pendekatan yang kuat. Tanpa aset, pendekatan hanya tinggal di atas kertas sebagai catatan.

3) Disposisi

Disposisi adalah orang dan atribut praktisi. Jika praktisi memiliki sikap yang baik, ia akan menyelesaikan strategi dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat pengaturan. Ketika praktisi memiliki cara alternatif untuk berperilaku atau penilaian dari produser strategi, siklus eksekusi pendekatan tidak akan cukup. Pertemuan peningkatan yang berbeda di negara-negara terbelakang menunjukkan bahwa tingkat

tanggung jawab dan kepercayaan perangkat rendah. Berbagai contoh kemerosotan yang terjadi di negara-negara terbelakang, misalnya Indonesia, merupakan contoh substansial dari rendahnya tanggung jawab dan kesungguhan perangkat dalam menjalankan program-program strategi.

4) Struktur Birokrasi

Konstruksi hierarkis yang bertanggung jawab untuk menjalankan strategi memengaruhi pelaksanaan pendekatan. Salah satu bagian utama utama dari setiap asosiasi adalah adanya metode kerja standar (SOP). SOP merupakan pembantu bagi setiap pelaksana dalam bertindak. Desain hierarkis yang terlalu panjang akan lebih sering melemahkan pengawasan dan menyebabkan formalitas, khususnya strategi administrasi yang membingungkan dan kompleks. Hal ini dengan demikian membuat latihan otoritatif menjadi pantang menyerah. Selengkapnya tentang teks sumber ini memerlukan sumber teks untuk mendapatkan informasi tambahan terjemahan Kirim masukan Papan samping

Tahapan implementasi kebijakan

Tahapan pelaksanaan strategi yang menempatkan pengaturan dipengaruhi oleh variabel yang berbeda untuk melakukan pendekatan yang sebenarnya. Di sini akan terlihat bagaimana pameran sebuah strategi, bagaimana substansi bekerja sama dengan tujuan berkumpul dan bagaimana berbagai variabel mulai dari iklim (politik, sosial dan lain-lain) mempengaruhi pelaksanaannya. Meter dan Hon dalam Sujianto (2008:35) mengatakan bahwa yang menentukan kemajuan pelaksanaan pendekatan meliputi isi kebijakan

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Norma dan tujuan strategi benar-benar fokus pada elemen yang menentukan hasil kerja, sehingga ID petunjuk eksekusi sangat penting dalam pengujian. Karena penanda mensurvei sejauh mana norma dan target masuk akal dari strategi umum, ini jelas karena memperkirakan pada umumnya sederhana.

b. Sumberdaya Kebijakan

Penggunaan strategi tidak hanya dilihat dari norma dan tujuan, tetapi juga memberikan modal yang digunakan untuk bekerja dengan organisasi. Aset yang direncanakan menggabungkan aset dan dorongan yang seharusnya membantu eksekusi yang kuat.

c. Aktivitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional

Eksekusi yang layak membutuhkan prinsip dan tujuan program yang harus dipahami oleh setiap orang yang dapat diandalkan agar eksekusi dapat dicapai. Kemudian, pada saat itu, perlu menyertakan korespondensi tetap yang ditentukan untuk mengumpulkan data. Korespondensi antar asosiasi sangat membingungkan. Akomodasi data turun ke suatu asosiasi atau asosiasi satu ke asosiasi lain, baik komunikator, baik sengaja atau tidak. Eksekusi yang berhasil membutuhkan sistem dan teknik kelembagaan yang melaluinya spesialis yang lebih tinggi dapat memberdayakan para pelaksana untuk bertindak dengan andal.

d. Kualitas Organisasi Pelaksana.

Desain regulasi dipandang sebagai atribut, standar dan terhubung dengan pemimpin yang dapat melakukan apa yang diselesaikan dalam pengaturan, terlebih lagi kualitas terhubung dengan kapasitas dan ukuran staf tingkat administrasi (kontrol) progresif pada pilihan sub-unit dalam siklus eksekusi . Aset pelaksana, legitimasi otoritatif, tingkat korespondensi terbuka, menjadi jaringan korespondensi vertikal dan datar tertentu dalam asosiasi hubungan formal dan kasual antara pelaksana dan pencipta strategi

e. Keadaan Moneter, Sosial dan Politik

Pada saat pelaksanaan strategi tidak lepas dari dampak finansial, sosial dan politik (Ekosospol). Pengaruh Exospol terhadap strategi pemerintah telah berubah menjadi isu utama yang mendesak, meskipun pengaruh variabel ini kurang diperhatikan. Bagaimanapun, elemen ini secara mencolok mempengaruhi kemajuan melakukan latihan. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor Exospol, lebih spesifiknya:

1. Apakah aset moneter saat ini dalam asosiasi pelaksana memadai untuk membantu pelaksanaan yang bermanfaat.
2. Seberapa besar atau bagaimana keadaan keuangan akan mempengaruhi pelaksanaan pendekatan.
3. Bagaimana secara keseluruhan; seberapa jelas masalah pendekatannya?
4. Apakah pertemuan puncak mendukung atau bertentangan dengan pelaksanaan perjanjian.

5. Bagaimana kualitas anggota dari perkumpulan pelaksana; ada penolakan atau dukungan anggota untuk strategi tersebut.

f. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Hal ini terkait dengan pandangan para pelaksana secara yuridis dimana pengaturan tersebut disampaikan. Ada tiga komponen yang mempengaruhi eksekusi dalam melakukan pendekatan:

1. Pemahaman dan informasi
2. Jalannya reaksi pelaksana terhadap penggunaan toleransi atau pemecatan.
3. Kekuatan mengeksekusi reaksi

Keenam fokus yang dibuat oleh Meter dan Horn dalam mempertimbangkan hasil eksekusi menunjukkan bahwa ada dampak dari disposisi dari para pembuat strategi itu sendiri, namun ada juga komponen luar yang justru melihat keinginan tercapainya tujuan. Sejalan dengan itu, harus ada keseimbangan yang menunjukkan kesesuaian antara program yang dibuat dengan keinginan tercapainya tujuan. Ini diselesaikan melalui korespondensi antara produsen strategi dan pelaksana mereka.

Grindle dalam Tanaya (2009:397) memperdebatkan kemajuan eksekusi strategi, lebih spesifiknya: setelah pengaturan diubah, maka eksekusi pendekatan dilakukan. Ini tidak sepenuhnya ditentukan oleh tingkat pelaksanaan strategi yang sebenarnya, khususnya:

1. Minat dipenuhi oleh strategi

2. Jenis keuntungan yang akan diperoleh
3. Perubahan yang diinginkan
4. Posisi produser strategi
5. Siapa yang menjalankan program

Untuk sementara keadaan eksekusi adalah:

1. Termasuk kekuatan, signifikansi, dan harmoni
2. Atribut dari badan pengelola
3. Pilihan dan daya tanggap

Sujianto (2008: 69) juga memiliki penilaian yang sama dengan George C. Edward, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan eksekusi, ternyata Sujianto lagi-lagi mengganti satu variabel, khususnya variabel pembinaan administrasi dengan berbagai macam keunggulan.

Green Building (Bangunan Hijau)

a) Konsep Bangunan Hijau (*Green Building*)

khususnya gagasan tentang struktur aktual yang berfokus pada upaya tidak berbahaya bagi ekosistem selama tahap aktivitas melalui beberapa aturan, misalnya, penggunaan energi, kondisi penyebaran udara dan cahaya dalam struktur, pelestarian air dalam struktur, penggunaan lahan dan administrasi ekologis di sekitar struktur. Berdasarkan pedoman Green Committee Indonesia (GBCI), tahun 2012 terdapat

beberapa Perangkat pemeringkat/GreenShip atau batas perkiraan suatu struktur yang tergolong Green Structure yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. *Appropriate Site Development*

Dalam hal ini lebih ditekankan pada pemanfaatan lahan suatu bangunan secara layak dan berkelanjutan harus menyediakan area hijau, area untuk transportasi umum, area untuk pengendara sepeda, area untuk landscape dsb.

2. *Energy Efficiency and Conservation*

Pemakaian energi secara efisien selama operasional bangunan antara lain dengan memakai alat monitoring penggunaan energi listrik, penggunaan cahaya alami dengan memperbanyak ruang terbuka memperbanyak bukaan ventilasi agar udara dalam ruangan menjadi lebih sejuk sehingga penggunaan AC menjadi lebih berkurang dan penggunaan teknologi energi terbarukan seperti penggunaan solar panel system.

3. *Water Conservation*

Upaya efisiensi konsumsi air dengan menggunakan monitoring volume penggunaan air secara berkala, penggunaan air secara efisien, menggunakan teknologi sistem daur ulang air limbah, pemanfaatan teknologi pengolahan tangkapan air hujan dsb.

4. *Material Resource and Cycle.*

Dalam hal ini memanfaatkan material bangunan yang lebih ramah lingkungan yang lebih ramah terhadap lingkungan seperti menggunakan material yang dapat digunakan ulang kembali (reuse) atau didaur ulang (recycle) kembali, menggunakan material yang tidak mencemari lingkungan, memanfaatkan kerangka material yang diproduksi dan menggunakan material terdekat.

5. *Indoor Health and Comfort*

Batas-batas bangunan hijau juga berfokus pada kenyamanan penghuni dalam suatu bangunan, termasuk menjaga sistem penyebaran udara di dalam bangunan agar tetap terbuka, kenyamanan suhu bangunan, dan kenyamanan visual untuk bangunan tersebut.

6. *Building Environmental Management*

Sebagai pengelola limbah yang dihasilkan selama aktivitas suatu struktur dan berupaya untuk mengurangi kontaminasi yang dihasilkan dalam struktur yang mempengaruhi iklim secara umum.

b. Pengertian Green Building

Green Building adalah suatu struktur yang sejak awal dalam tugas persiapan, pengembangan, kegiatan hingga pemeliharaan, menitikberatkan pada bagian-bagian pengamanan, penghematan, pengurangan pemanfaatan aset tetap, mengikuti sifat udara dalam ruangan, dan berfokus pada kekuatan penyewa semua mematuhi aturan nonstop.

Istilah struktur hijau adalah pekerjaan untuk memberikan struktur yang memanfaatkan proses ekosistem yang tidak berbahaya, pemanfaatan aset yang baik selama siklus hidup struktur mulai dari penataan, pengembangan, aktivitas, pemeliharaan, desain ulang, dan bahkan penghancuran.

b) Perspektif Utama dalam Struktur Hijau

Struktur hijau dimaksudkan untuk mengurangi dampak iklim yang dibangun pada kesejahteraan manusia dan alam, melalui keahlian dalam pemanfaatan energi, air dan aset lainnya, menjaga kesehatan penyewa dan meningkatkan efisiensi spesialis, mengurangi pemborosan/pelepasan cairan dan gas yang kuat. , mengurangi kontaminasi/kuat, kontaminasi cairan dan gas serta mengurangi kerusakan ekologis. Berikut adalah sebagian dari bagian dasar dari struktur hijau:

a. Material

Bahan yang digunakan untuk merakit harus berasal dari alam, dan merupakan sumber daya ramah lingkungan yang diawasi secara ekonomis. Kekokohan bahan struktur yang tepat harus dicoba, namun pada saat yang sama mengandung komponen bahan yang digunakan kembali, mengurangi penciptaan pemborosan, dan dapat digunakan kembali dan digunakan kembali.

b. Energi

Pengoperasian pengisi daya bertenaga sinar matahari dianggap memiliki opsi untuk mengurangi biaya daya bangunan. Selain itu, bangunan juga harus dilengkapi dengan jendela untuk menghemat penggunaan energi, terutama lampu dan pendinginan. Pada siang hari, jendela harus dibuka untuk mengurangi penggunaan daya. Windows jelas juga dapat bekerja pada kesejahteraan dan efisiensi penghuninya. Bangunan hijau juga harus menggunakan pencahayaan hemat energi, peralatan listrik hemat energi, dan peningkatan daya berkelanjutan, seperti turbin angin dan pengisi daya berbasis sinar matahari.

c. Air

Penggunaan air dapat dihemat dengan memperkenalkan kerangka resapan air. Strategi ini dapat menggunakan kembali air yang dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman atau menyiram jamban. Pemanfaatan alat-alat hemat air misalnya pancuran air aliran rendah, tidak termasuk mandi di kamar mandi, pemanfaatan jamban hemat air, dan pengenalan sistem pemanas air non-listrik.

d. Kesejahteraan

Penggunaan bahan bangunan dan furnitur tidak berbahaya, bebas dari debit rendah atau non-VOC (campuran alami yang tidak stabil), dan perlindungan air dari mencegah munculnya mikroorganisme dan mikroorganisme lainnya. Kualitas udara dalam ruangan juga dapat dikembangkan lebih lanjut melalui sistem ventilasi dan pengontrol kelembaban udara. Kehadiran struktur yang memanfaatkan proses ekosistem yang tidak berbahaya, pemanfaatan aset yang baik selama pola keberadaan struktur mulai dari penataan, pengembangan, aktivitas, dukungan, perombakan bahkan perusakan jelas memberikan manfaat.

b) Keuntungan Kemajuan Struktur Hijau

Keuntungan memiliki struktur yang memanfaatkan gagasan struktur hijau atau green structure. Berikutnya adalah keuntungan dari perbaikan struktur hijau, lebih spesifik:

1) Keuntungan Ekologis

- a. Meningkatkan dan menjaga keragaman lingkungan
- b. Lebih mengembangkan kualitas udara
- c. Kurangi pemborosan
- d. Perlindungan aset normal

2) Keuntungan Moneter

- a. Mengurangi biaya fungsional
- b. Membuat dan mengembangkan sektor bisnis untuk barang-barang hijau dan administrasi
- c. Meningkatkan efisiensi penduduk
- d. Meningkatkan eksekusi siklus hidup moneter

3) Keuntungan Sosial

- sebuah. Bekerja pada kesejahteraan dan kenyamanan penghuni
- b. Bekerja pada kualitas berselera tinggi
- c. Mengurangi masalah dengan yayasan terdekat

Ijin Mendirikan Bangunan

c) Pengertian IMB

Izin pengembangan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membuat, mengubah, mengembangkan, mengurangi, serta memelihara bangunan sesuai dengan kebutuhan manajerial dan khusus yang relevan.

Sunarto juga mengatakan bahwa IMB adalah lisensi yang diberikan oleh otoritas publik daerah kepada badan atau orang untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud adalah supaya desain betuk pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan Nilai Dasar Bangunan (NDB), Nilai Luas Bangunan (NLB) serta Ketinggian Bangunan (KB) yang ditetapkan sesuai dengan syaratsyarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, orang lain dan lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 menegaskan sedangkan izin bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada pemilik bangunan untuk membuat, mengubah, menumbuhkan, mengurangi, serta memelihara struktur sesuai dengan kebutuhan manajerial dan khusus yang bersangkutan. Selain itu, masuk akal juga bahwa permohonan izin bangunan adalah permohonan yang diajukan oleh pemilik bangunan kepada pemerintah setempat untuk mendapatkan hibah bangunan.

Setiap individu yang mengembangkan struktur harus memiliki struktur IMB. IMB adalah surat bukti yang mendasari dari pemerintah terdekat bahwa pemilik bangunan dapat mengembangkan bangunan sesuai dengan kemampuannya yang tidak sepenuhnya ditentukan dan mengingat pengaturan khusus bangunan yang telah disahkan oleh pemerintah daerah.

IMB adalah kantor hibah utama yang diizinkan dalam aktivitas struktur, yang menjadi insentif pengontrol untuk aktivitas struktur. Cara paling umum untuk menerima IMB harus mengikuti standar bantuan yang luar biasa dan administrasi yang sederhana / masuk akal. Permohonan untuk IMB struktur adalah sistem yang mendasari untuk mendapatkan IMB struktur.

Dasar Hukum Penerbitan IMB

Bangunan Gedung merupakan hasil karya manusia yang direncanakan untuk membantu kebutuhan eksistensi manusia. Pada dasarnya, setiap individu, kantor atau perusahaan diperbolehkan untuk mengembangkan struktur sesuai kebutuhan mereka, aksesibilitas aset, jenis dan perkembangan. Hanya saja memikirkan bahwa pembangunan suatu struktur dapat mengganggu orang lain dan bahkan membahayakan kepentingan umum, jelas pembangunan struktur harus dikendalikan dan dikelola oleh otoritas publik. Untuk itu kami sangat menginginkan keputusan yang sah yang dapat mengontrol sehingga struktur dapat dibuat dengan tepat. Pedoman mengenai bangunan di Indonesia telah diatur dalam bidang kekuatan yang serius untuk sebuah premis, khususnya sebagai peraturan yang memiliki pedoman pelaksana sebagai undang-undang tidak resmi. Peraturan yang diharapkan adalah Peraturan No. 4 tahun 2008 tentang bangunan gedung.

***Green Building* sebagai salah satu syarat memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Probolinggo**

Penataan ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kota merupakan konsekuensi dari penataan ruang wilayah kota yang masih mengudara dengan pedoman daerah. Pembangunan dan penggunaan bangunan tersebut harus sesuai dengan peruntukan kawasan yang dikelola dalam RTRW Kota, RDTR, dan RTBL untuk kawasan yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 Ayat 2 tentang Prasyarat Penugasan dan Tenaga Bangunan dalam Pasal 13 ayat (4), untuk secara khusus setiap orang atau unsur yang memerlukan data tentang peruntukan kawasan atau susunan Bangunan Gedung dan Penatausahaan Ekologi dalam setiap permohonan tidak ditetapkan oleh Kepala Daerah Provinsi sesuai dengan pengaturan yang bersangkutan dan dituangkan dalam kebutuhan penyusunan dengan mempertimbangkan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Sambungan I Peraturan Daerah ini. Sehubungan dengan menjadikan Green Structure atau bangunan hijau sebagai prasyarat Izin Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 Ayat 4 tentang Koefisien Kawasan Hijau (KDH) dalam Pasal 16 sebagai berikut:

(1) tidak seluruhnya diselesaikan berdasarkan kepentingan perlindungan alam/asimilasi air tanah;

(2) Pengaturan seberapa besar KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan RTRW Kota atau sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman terkait;

(3) Setiap bangunan terbuka, dalam hal tidak ditentukan dalam hal apapun, basis KDH tidak seluruhnya diselesaikan.

Makna tujuan pembangunan berkelanjutan

Pentingnya tujuan perbaikan adalah cara paling umum untuk menciptakan lahan, wilayah perkotaan, organisasi, jaringan, dan sebagainya dengan standar menangani kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kepuasan kebutuhan orang di masa depan. Salah satu elemen yang harus diperhatikan untuk mencapai perbaikan praktis adalah cara memperbaiki pemusnahan ekologis. Perbaikan yang layak adalah upaya perbaikan yang menggabungkan perspektif moneter, sosial, alam, bahkan upaya untuk saat ini namun tidak menghilangkan atau mengurangi kebutuhan orang di masa depan. Secara umum, ada beberapa kualitas dari pergantian peristiwa praktis, khususnya perbaikan yang diselesaikan dapat membatasi pencemaran ekologis, berfokus pada iklim fisik dan sosial, mempertimbangkan sisi-sisi penting umat manusia dan berfokus pada etika yang dianut oleh masyarakat setempat. daerah, sangat penting dan ideal serta lama dan saat ini, serta aturan untuk terus mengikuti kesehatan keuangan, politik, sosial-sosial keselamatan publik. Salah satu sudut pandang penting dalam perbaikan yang dapat didukung adalah proses pembangunan yang layak dengan memanfaatkan strategi dan bahan ekosistem yang sesuai, efektif dan tidak berbahaya. Tujuan perbaikan yang dapat didukung atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Feasible Improvement Objectives yang dibatasi sebagai SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 pencapaian terukur dan batas

waktu yang telah dilaksanakan oleh Negara-negara Bersatu sebagai rencana kemajuan dunia untuk keuntungan manusia. Tujuan ini bersama-sama dideklarasikan oleh negara-negara antar pemerintah dalam tujuan Unified Countries yang diberikan pada tanggal 21 Oktober 2015 sebagai keinginan perbaikan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Peningkatan Seribu tahun yang disahkan oleh kepala 189 negara sebagai Seribu tahun Pernyataan. di komando pusat PBB pada tahun 2000 dan telah aktif sejak akhir tahun 2015. Salah satu dari 17 tujuan adalah tujuan no 11, khususnya untuk membangun kawasan perkotaan dan permukiman yang komprehensif, terlindungi, kuat dan layak.

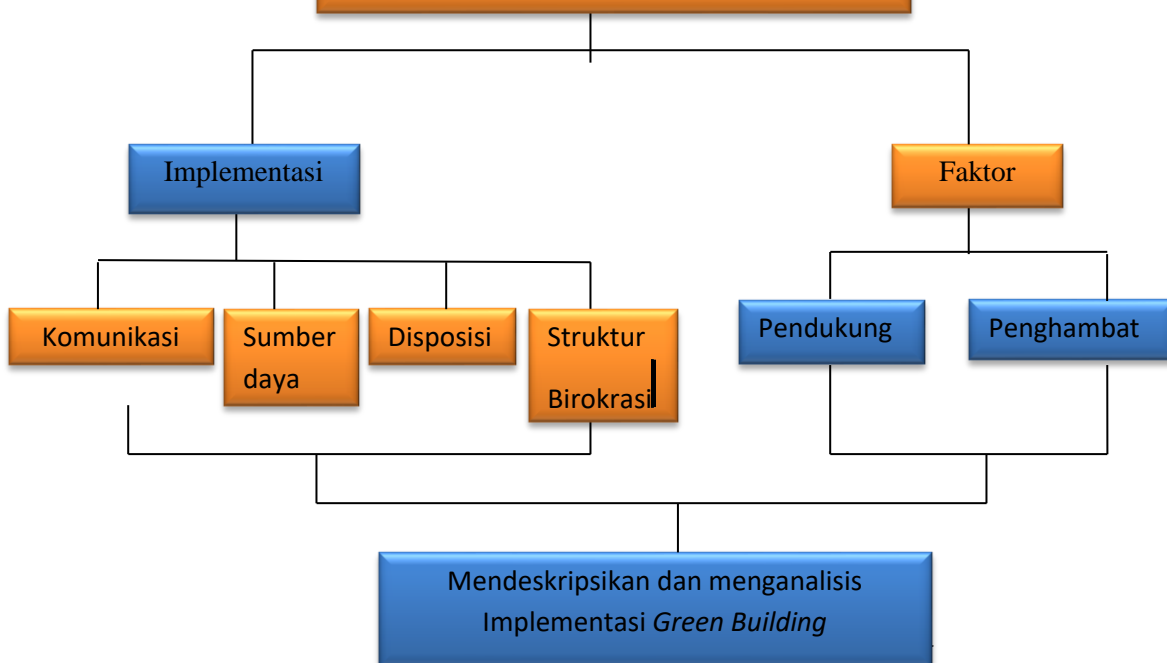
Kerangka Pemikiran

Sebuah sistem yang layak akan masuk akal secara hipotetis hubungan antara faktor-faktor untuk dipertimbangkan. Sesuai Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60), merekomendasikan bahwa struktur penalaran adalah model yang dihitung tentang bagaimana hipotesis menghubungkan dengan variabel yang berbeda yang telah dicirikan sebagai masalah yang signifikan. Sementara itu, menurut Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2017: 60), sistem ini merupakan klarifikasi sementara dari efek samping yang menjadi objek permasalahan. Dari percakapan di atas, dapat diduga bahwa struktur penalaran merupakan klarifikasi singkat yang diperhitungkan dari hubungan antara setiap objek masalah berdasarkan hipotesis. Sistem pemikiran dalam pemeriksaan ini harus terlihat pada grafik 2.1 terlampir.

Kerangka Pemikiran

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan. Sesuai dengan PERDA Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung.

Menurut Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat (8) berbunyi bahwa ijin mendirikan bangunan gedung merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh pemilik bangunan gedung.



Sumber : Virgarezza, 2022

